
Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan di Kabupaten Bojonegoro

✉¹Irwantoro, & ²Indah Noviandari

¹Balitbang Prov. Jatim

²Universitas Bhayangkara Surabaya

DOI: <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v13i1.283>

ARTICLE INFO

kebijakan pemerintah,
lembaga keuangan non
bank, kesejahteraan
perempuan,
the role of
Government, non
financial institutions
bank, business woman

Article History:

Received : Desember 2018

Accepted : Juni 2019

Abstrak:

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro bertitik tolak dari permasalahan penelitian Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan, antara lain (i) Bagaimana kondisi Lembaga Keuangan Non Bank dalam Peningkatan Kesejahteraan Perempuan, (ii) Hambatan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank dalam Peningkatan Kesejahteraan Perempuan, (iii) Strategi peningkatan Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank dalam Peningkatan Kesejahteraan Perempuan di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa lembaga keuangan non bank untuk pengembangan usaha perempuan di Jawa Timur diantaranya Koperasi Wanita yang pada tahun 2017 terdapat 447 Koperasi Wanita yang tersebar di 16 Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro disamping itu ada pula Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan yang memang ditujukan bagi usaha perempuan, hambatan yang dijumpai dalam hal pengembangan lembaga keuangan non bank bagi usaha perempuan adalah belum adanya regulasi maupun payung hukum terutama untuk lembaga yang lahir dari program pengentasan kemiskinan yang telah berakhir; peran pemerintah dalam pengembangan lembaga keuangan non bank bagi usaha perempuan sudah dilaksanakan dengan menyediakan anggaran bagi usaha perempuan melalui program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan maupun pengembangan Koperasi Wanita.

Abstract:

The research was conducted in bojonegoro district dotted reject some of the problem of government policy research in the development of bank bonds among non-bank financial institutions in an effort to increase women welfare, among others (i) the conditions of bank bonds among non-bank financial institutions in an effort to increase women welfare, (ii) obstacles in the development of bank bonds among non-bank financial institutions in an effort to increase women welfare, (iii) strategy an increase in bonds among non-bank financial institutions development bank in an effort to improving the welfare of the women in the Bojonegoro regency. This research uses qualitative descriptive method, i.e. a contextual research which makes human beings as instruments and adapted to the situation are reasonable in relation to the collection of data that is generally qualitative in nature. The conclusion of the study are the index points to some of a village financial institution non banking institutions for business expansion women than men in east java and among the companies were cooperatives woman which on years 2017 there are 447 cooperatives woman who are widely dispersed across 16 sub districts in the bojonegor regency is an object of worship with some of the tea leaves of the program interlace matra of reducing the incidence of poverty feminization of that really aimed to the business women, barriers encountered in terms of the development of the non financial institutions bank for business women is not yet as well as the legal umbrella regulation mainly to institutions born of the poverty alleviation program has ended , the role of Government in the development of the non bank financial institutions for women's efforts have been conducted to provide a budget for business women through programs established by Matra-Prevention of Feminization of Poverty are both development of Woman's Cooperative.

Cite this as:

Irwantoro., Noviandari, I. (2019). Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan di Kabupaten Bojonegoro. *Cakrawala*, 13(1). 109-118. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v13i1.283>

✉Corresponding author :

Address : Jalan Gayung Kebonsari No 56 Surabaya

Email : irwanlitbangjatim@yahoo.co.id

Phone : -

© 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan

Provinsi Jawa Timur

p-ISSN 1978-0354 | e-ISSN 2622-013X

Pendahuluan

Isu gender dan kemiskinan, dalam hal ini rumah tangga merupakan salah satu sumber diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan. Ketidaksetaraan di dalam alokasi sumberdaya dalam rumah tangga memperlihatkan laki-laki dan perempuan mengalami bentuk kemiskinan yang berbeda. Di ruang publik, kemiskinan perempuan selalu dikaitkan dengan tertutupnya ruang-ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya formal bagi perempuan. Bagi perempuan seringkali konsep ruang publik ini diartikan sebagai tempat kerja atau tempat berusaha daripada forum-forum di dalam komunitas. Keterlibatan dalam forum publik di dalam komunitas pun biasanya terbatas dan masih tidak terlepas dari peran domestiknya, seperti arisan, pengajian atau perkumpulan keagamaan, dan PKK.

Penanggulangan kemiskinan kaum perempuan dan anak merupakan masalah sangat serius. Data Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 menunjukkan, dari sebanyak 1.230.042 rumah tangga berstatus kesejahteraan 10% terendah di Jawa Timur, 12,4% atau sebanyak 152.343 di antaranya adalah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan. Sebanyak 22.858 orang atau 15% di antaranya hidup sebatang kara, sedangkan sisanya sebanyak 129.485 kepala rumah tangga perempuan memikul beban tanggung jawab atas kehidupan anggota rumah tangga sebanyak 368.919 jiwa. Kecuali itu, dari data yang sama menunjukkan terdapat 5.174.675 orang yang tergolong ke dalam status kesejahteraan 10% terendah di Jawa Timur, di mana hampir separo di antaranya, 49,7% atau sebanyak 2.575.416 adalah perempuan.

Lembaga keuangan, khususnya perbankan, menerapkan persyaratan yang ketat dan berhati-hati mengingat dana yang disalurkan untuk kredit adalah dana yang

berasal dari pihak ketiga (deposan). Salah satu bentuk kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit adalah penggunaan kriteria 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition* dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit.

Dari sisi individu masyarakat, kesulitan dalam memperoleh akses keuangan karena pelaku usaha perempuan pada umumnya kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan antara lain belum memiliki usaha yang berkesinambungan, belum memiliki laporan keuangan yang standar, serta tidak memiliki agunan yang mencukupi. Sehingga perlu adanya peran *stakeholder* dalam pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan untuk meningkatkan aksesibilitas perempuan pada permodalan usahanya. Dalam hal perempuan dan kemiskinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya mencari solusi agar dapat menekan angka kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan. Seperti diketahui data BPS Jawa Timur per September 2015 mencatat hingga Triwulan I jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai lebih dari 4,7 juta jiwa atau sekitar 12,3 persen dari total penduduk Jawa Timur. Menurut Sakernas BPS Tahun 2014 status pekerjaan sebagai pengusaha (berusaha sendiri dan berusaha dengan dibantu buruh) dan buruh/karyawan/pegawai didominasi oleh laki-laki, sedangkan pekerja bebas/keluarga/tak dibayar didominasi oleh perempuan

Dengan memberdayakan usaha perempuan yang ditunjang oleh lembaga keuangan non bank ataupun beberapa program yang digagas Pemprov Jatim seperti Program Jalur Matra maupun Pemberdayaan dan Pengembangan Perempuan Ekonomi Lokal (P3EL), Feminimisme, serta Koperasi dan

UKM diharapkan perempuan mampu mendongkrak perekonomian di Jawa Timur lebih baik lagi. Tak hanya itu, kaum perempuan pun diberikan pelatihan untuk mengelola bisnis dan usahanya. Sekitar enam ratus perempuan yang memiliki UKM diberikan pelatihan manajemen bisnis dan usaha, dengan harapan adanya pemerataan ekonomi di setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 sebesar 14,6% atau sejumlah 180.990 jiwa, sedangkan Kementerian Sosial pada tahun yang sama merilis angka kemiskinan Bojonegoro sebesar 175.011 KK atau 563.225 jiwa dimana angka ini sama dengan 45% penduduk Bojonegoro.

Tinjauan Pustaka Kebijakan Pemerintah

Menurut Winarno (2012) kebijakan memiliki beragam definisi, yang masing-masing memiliki penekanan berbeda, hal ini tidak terlepas dari latar belakang seorang ilmunan tersebut. Namun demikian, satu hal yang perlu diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu.

Thomas R. Dye mendefinisikan bahwa kebijakan publik itu adalah “kebijakan merupakan pilihan-pilihan apapun oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu maupun untuk tidak melakukan sesuatu (*whatever government choose to do or not to do*) (Winarno, 2009 : 17). Kebijakan adalah sebuah keputusan politis yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari sikap pemerintah untuk memecahkan sebuah persoalan publik (Dian Fitriani dkk, 2016). Jadi dalam hal ini yang dimaksud kebijakan pemerintah adalah

merupakan segala tindakan pemerintah yang dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu (Abdullah Ramdhani dkk, 2017).

Lembaga Keuangan Non Bank

Pengertian lembaga keuangan bukan bank atau sering juga digunakan istilah lembaga keuangannonbank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Lembaga keuangan non bank ini berkembang sejak tahun 1972, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Lembaga keuangan bukan bank yang dapat memberikan pelayanan memberikan jasa dalam bidang keuangan cukup banyak jenisnya (Jamal Wiwoho, 2014). Nurastuti (2011:53) mengungkapkan: “Lembaga keuangan non bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan asset non finansial atau asset riil.” Pengertian lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi

perusahaan. Bidang usaha yang termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank antara lain adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, lembaga pembiayaan dimana lembaga pembiayaan termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank.

Kesejahteraan Perempuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesejahteraan diartikan sebagai keadaan yang sejahtera atau keamanan, keselamatan dan juga ketentraman. Sementara dalam istilah umum kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, damai dan juga dalam keadaan sehat. Kesejahteraan atau sejahtera menunjuk pada suatu kondisi yang dianggap baik oleh kebanyakan masyarakat. Setiap orang memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda tentang kesejahteraan, oleh karena itu kesejahteraan ini dianggap lebih bersifat subyektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain adalah jumlah anggota keluarga, tempat tinggal, keadaan sosial keluarga dan keadaan ekonomi keluarga. Sementara faktor eksternal, yaitu, kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan dikembangkan, serta goncangan dan ketegangan jiwa antar keluarga perlu dihindari karena dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman kehidupan berkeluarga (Safila Mardiana dkk, 2018).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (Moleong, 2009:3) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat. (Nazir, 2003: 51).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2005:60) menyatakan bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.

Hasil dan Pembahasan

Permodalan Usaha Rumah Tangga Miskin melalui UPK di Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro masih memiliki sekitar 136 UPK yang lahir dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. UPK adalah kepanjangan dari Unit Pengelola Keuangan, yaitu lembaga pengelola kegiatan ekonomi masyarakat milik Desa/Kelurahan, dan dikelola secara otonom oleh masyarakat namun belum dikhususkan untuk perempuan. Saat ini aset Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang ada di seluruh kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro mencapai Rp 120 miliar, tetapi belum ada regulasi yang jelas setelah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) selesai diakhir tahun 2014 dimana UPK tersebut rencana selanjutnya akan dikembangkan menjadi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bisa saja diprioritaskan untuk usaha perempuan mengingat banyaknya kendala atau hambatan dalam pengembangan usaha perempuan diantaranya:

1. Lemahnya akses permodalan untuk pengembangan usaha.
2. Keterbatasan waktu karena perempuan masih harus mengurus pekerjaan rumah tangga.
3. Masih rendahnya SDM perempuan di desa.

UPK dibentuk melalui musyawarah desa/kelurahan, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa sedangkan untuk kelurahan, ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota. Apabila di Desa/Kelurahan sudah terdapat lembaga ekonomi milik pemerintah Desa/Kelurahan sejenis UPK, maka sepanjang lembaga tersebut fungsional, tidak bermasalah dan disepakati dalam musyawarah, maka dapat difungsikan sebagai UPK yang mempunyai visi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial.

Dalam pengamatan di lapangan dijumpai bahwa selama ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro masih melakukan pembinaan maupun pelatihan kepada pelaku UPK untuk meningkatkan sumberdaya manusia karena mereka mempunyai semangat yang tinggi untuk tetap mengembangkan UPK tersebut dan harapannya UPK tersebut ada keberlanjutan misalnya dikembangkan menjadi BUMdes dengan alasan bahwa organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing

ekonomi perdesaan.

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain: (i) pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, (ii) mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, (iii) mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, (iv) menguatkan kelembagaan ekonomi desa, (v) mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Dalam rangka membangkitkan ekonomi perdesaan dan pengentasan kemiskinan melalui Program Gerdu-Taskin Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan UPK yang terbukti secara signifikan sebagai lembaga dana dan keuangan perdesaan. UPK dipersiapkan sebagai embrio BUMDes yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ekonomi perdesaan dimana pembentukan BUMDes merupakan realisasi tindak lanjut pengembangan UPK.

Pengembangan Usaha Perempuan melalui Kopwan di Kabupaten Bojonegoro

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bojonegoro mempunyai peran yang cukup memadai dalam pengembangan usaha perempuan di Kabupaten Bojonegoro melalui pengembangan Kopwan. Menurut hasil FGD dijumpai bahwa pada tahun 2010 sampai 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan program bantuan sosial kepada keluarga perempuan yang dimaksudkan untuk pertumbuhan ekonomi di perdesaan yang selanjutnya dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut dikembangkan menjadi Kopwan dimana terbentuk 430 kopwan pada tahun 2009 sampai 2010, masing-masing kopwan mendapatkan Rp. 25 juta yang kemudian Kopwan yang sudah terbentuk tersebut dalam perkembangannya ada yang kinerjanya bagus, kurang bagus maupun stagnan. Kopwan yang kinerjanya bagus berjumlah sekitar 140 Kopwan dan telah mendapatkan bantuan yang kedua, adapun penilaiannya dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi adapun laporan hasil penilaiannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari hasil penilaian tersebut terdapat Kopwan yang mendapatkan bantuan sampai 4 putaran yaitu mendapatkan Rp. 200 juta yang dalam perkembangannya jenis usaha Kopwan tersebut ada yang berbentuk pertokoan, usaha butik, salon maupun konveksi, namun ada juga yang khusus usaha simpan pinjam.

Kendala yang dijumpai pada pengembangan Kopwan terutama yang berada di desa yang jauh dari ibu kota kabupaten diantaranya adalah masalah sumberdaya manusia yang rendah. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bojonegoro telah melakukan bimtek maupun pelatihan diantaranya pelatihan penyusunan administrasi keuangan. Disamping itu masalah sulitnya akses permodalan bagi Kopwan, adapun

strategi yang digunakan adalah menggali permodalan dari dalam Kopwan itu sendiri melalui peningkatan simpanan wajib, simpanan pokok maupun simpanan pokok maupun dengan peningkatan terhadap pelaksanaan sisten tanggung renteng. Permasalahan yang sering dijumpai pada Kopwan diantaranya adalah beberapa anggota Kopwan yang mengajukan pinjaman digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif, dimana hal ini perlu adanya peningkatan kesadaran kepada anggota Kopwan agar tidak menggunakan hasil pinjamannya untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif.

Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu daerah yang mendapatkan program Jalin Matra dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan dukungan pendampingan dan pengalokasian dana program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan tahun 2015 sampai 2018 berdasarkan MoU yang dilakukan antara Gubernur Jawa Timur dan Bupati Bojonegoro. Program Jalin Matra PFK di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2014 sebagai pilot project dilaksanakan pada 6 desa yang terdapat di 3 Kecamatan, pada tahun 2015 dilaksanakan di 8 desa pada 4 kecamatan

Menurut petunjuk pelaksanaan Program Jalin Matra PFK Kabupaten Bojonegoro kondisi permasalahan dan kemiskinan yang dihadapi rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan secara umum lebih kronis dibanding dengan kepala rumah tangga laki-laki. KRPT tidak hanya mengalami permasalahan di sektor ekonomi, tetapi juga problematika psikologis, sosial dan budaya. Kebutuhan untuk mendapatkan jalan keluar dari perangkap kemiskinan tidak cukup melalui fasilitasi akses ekonomi, tetapi memerlukan dukungan interaksi secara

intensif dari figure yang secara keseharian sudah dikenal, dinilai mampu memberikan perlindungan, berkelanjutan, serta memiliki legitimasi sosial. Figur tersebut yang selanjutnya menjadi “*mother care*” atau lainnya sebagai sosok ibu/orang tua yang memiliki kepedulian yang tinggi, menjadi simpul interaksi dan berbagi antar KRTP sehingga akan memupuk harapan serta semangat untuk berjuang bersama-sama dalam upaya keluar dari kemiskinan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kader dari Tim Penggerak PKK adalah figur yang tepat untuk berposisi sebagai “*mother care*” bagi KRTP. Gerakan PKK merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Jejaring PKK dapat menjangkau kepada keluarga-keluarga secara langsung, karena telah terbentuk kelompok-kelompok PKK RW, RT dan kelompok Dasa Wisma. Sehingga melalui optimalisasi TP-PKK dalam Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) diharapkan dapat benar-benar secara riil memecahkan permasalahan kemiskinan yang berwajah perempuan ditingkat keluarga.

Atas dasar permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sangat mendukung Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Bojonegoro atau yang biasa kita sebut Program Jalin Matra PFK Pola Mandiri (*Matching Grant*). Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) ini dirancang untuk menangani kemiskinan perempuan, terutama bagi rumah tangga yang Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP). Program ini tidak hanya sebagai upaya jangka pendek untuk memberikan bantuan kepada KRTP, tetapi terlebih daripada itu

adalah sebagai program yang berkelanjutan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan pada KRTP. Sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Bojonegoro yang sehat, cerdas dan produktif secara bertahap dapat terwujud.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka disimpulkan bahwa :

- 1) Pada dasarnya kondisi lembaga keuangan non bank bagi usaha perempuan pada lokus penelitian yang didominasi oleh koperasi wanita yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten yang dalam kenyataannya masih terdapat beberapa koperasi wanita yang tidak aktif maupun stagnan yang disebabkan karena permasalahan SDM pelaku koperasi wanita yang relatif masih rendah terutama terjadi pada koperasi wanita yang terdapat di perdesaan yang jauh dari pusat kota disamping itu masalah permodalan dan masih ketergantungannya pada pemerintah. Dalam hal kuantitas Kabupaten Bojonegoro mempunyai 400 koperasi wanita, sedangkan jika dilihat dari segi kualitas kondisi koperasi wanita kurang dari 50% dalam keadaan sehat atau baik dari sisi manajemen dan keuangannya.
- 2) Terdapat lembaga keuangan non bank bagi usaha perempuan yang merupakan ex program PNPM yaitu Simpan Pinjam Perempuan yang melekat pada Unit Pelaksana Kegiatan (UPK), dimana dalam perkembangannya setelah program PNPM berakhir maka berhentilah semua kegiatan simpan pinjam perempuan tersebut padahal sebenarnya asset yang dimiliki baik berupa gedung dan modal masih cukup besar.
- 3) Disamping lembaga keuangan mikro tersebut sebenarnya terdapat juga program pemberdayaan masyarakat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi

Kemiskinan (PFK) yang memang ditujukan bagi usaha perempuan. 4) Salah satu hambatan dalam yang dijumpai dalam hal pengembangan lembaga keuangan non bank bagi usaha perempuan adalah belum adanya regulasi maupun payung hukum terutama untuk lembaga yang lahir dari program pengentasan kemiskinan yang telah berakhir, sehingga walaupun mempunyai asset yang cukup besar namun tidak bisa melakukan kegiatan yang konkrit bagi pengembangan usaha perempuan. Saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 1) Diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meningkatkan anggaran bagi permodalan tidak hanya kepada koperasi wanita yang dinilai sehat namun juga untuk koperasi wanita yang tidak sehat dengan diberikan pendampingan maupun pengawasan yang lebih intensif, disamping itu juga perlu lebih mengintensifkan pelatihan, pembinaan dan pengawasan maupun pendampingan agar koperasi yang telah ada dapat terus berkembang dan lebih banyak banyak menjangkau layanannya bagi usaha perempuan. 2) Dalam hal pemanfaatan maupun pengembangan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) eks-program PNPM maupun Gerduaskin yang mempunyai unit usaha Simpan Pinjam Perempuan, Pemerintah Kabupaten dengan fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan menindaklanjuti permasalahan terhentinya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang melekat pada Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) yang masih mempunyai asset cukup besar tersebut dengan menginformasikan maupun memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat agar segera membuat payung hukum maupun regulasi untuk menentukan langkah berikutnya berkaitan dengan pengembangan usaha perempuan. 3) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

maupun Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia harus bersinergi mendorong dan memfasilitasi serta melakukan mapping terhadap pemberdayaan LKM sentra sebagai embrio terbentuknya Lembaga Keuangan Non Bank bagi usaha perempuan sesuai dengan UU No 1 tahun 2013 tentang OJK. 4) Berkaitan dengan keberlanjutan program Jalin Matra PFK cukup dirasakan manfaatnya bagi pengembangan usaha perempuan miskin sehingga Pemerintah Kabupaten Bojonegoro benar-benar mendukung program tersebut sampai berakhirnya program dan mulai saat ini baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten maupun pihak Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia diharapkan memfasilitasi kegiatan pasca program dimaksud agar terdapat keberlanjutan setelah berakhirnya Program Jalin Matra dengan memfasilitasi maupun mengarahkan agar terbentuknya koperasi wanita ataupun Badan Usaha Milik Desa yang khusus ditujukan untuk pengembangan usaha perempuan.

Daftar Pustaka

- Abdullah Ramdhani dkk, 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik* Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12 <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/viewFile/1/1>
- Amira, 2012. *Membangun E-Learning dengan Learning Management System Moodle*. Jakarta: PT Berkah Mandiri Globalindo.
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

- Dian Fitriani dkk, 2016. Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov, Vol.2 No.2, Oktober 2016.
- Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.
- Jamal Wiwoho, 2014. Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Undip, Vol 43, No. 1 Tahun 2014.
- Kader, R. A., Mohamad, R. M., and Ibrahim, C. A. 2009. Success Factors for Small Rural Entrepreneurs under the One-District-One-Industry Programme in Malaysia. Contemporary Management Research.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988.
- Komarudin. 1994. Ensiklopedia Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Profosal*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Ghalia
- Nurastuti, Wiji, 2011. Teknologi Perbankan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Panda.N.M, 2000. What brings entrepreneurial success in a developing region?. Journal of Entrepreneurship.
- Panggabean, Riana. 2005. Efektivitas Program Dana Bergulir Bagi Koperasi dan UKM. Infokop No. 26.
- Parker, B.J. 2010. A Conceptual Framework for Developing the Female Entrepreneurship Literature.
- Poerwadarminta, 1995, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Reijonen,H., & Kompulla,R. 2007. Perception of Success and Its Effect on Small Firm Performance. Journal of Small Business and Enterprise Development.
- Smeru, Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI, 2003, Upaya Penguatan Usaha Mikro Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T, 2009. Women Entrepreneurship in Asian Developing Countries: Their Development and Main Constraints. Journal of Development and Agricultural Economics.
- Tambunan,T. 2012. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Isu-isu Penting. Jakarta : Penerbit LP3ES.
- Wasistiono, Sadu, 2002. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Jakarta L: Fokus Media.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta : CAPS

<http://www.rmoll.co/read/2013/10/22/130347/DPP-Iwapi-Motivasi->

<http://wartaekonomi.co.id/berita9636/hipmi-berharap-porsi-jumlah-wanita-pengusaha-meningkat.html>

https://www.researchgate.net/publication/327442367_Peranan-Perempuan-Dalam-Meningkatkan-Kesejahteraan-Ekonomi-Keluarga-Studi-Tentang-Peranan-Petugas-K3L-Perempuan-Universitas-Padjajaran.